



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat Kantor : Jl. Sekumpul Desa Bincau No. 3 RT.03 RW. 05 Telp. (0511) 6749084 Martapura
Website : disdik.banjarkab.go.id E-Mail : disdik@banjarkab.go.id Kode Pos 70651

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR

NOMOR:076 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN BANJAR TAHUN PELAJARAN 2026/2027

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR,

Menimbang

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, maka perlu Penetapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Banjar Tahun Pelajaran 2026/2027;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar pada satuan pendidikan dengan kondisi pengecualian.
- c. , maka perlu Penetapan Zonasi dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Banjar Tahun Pelajaran 2024/2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan

Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);

15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** Menetapkan Daya Tampung Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Banjar Tahun Pelajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** Apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 26 Maret 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjar



H. Liana Penny, ST, MS
Pembina TK. I
NIP. 19800712 200501 2 013

**DAFTAR DAYA TAMPUNG SPMB JENJANG SMP NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2026/2027**

Satuan Pendidikan	Kecamatan	Status	Jumlah Daya Tampung (banyaknya kelas) untuk SPMB TA. 2026/2027	Jumlah Calon Murid Baru yang bisa diterima (Jumlah Daya Tampung/kelas x 32 orang)	Keterangan
SMPN 1 Aluh-Aluh	Aluh-Aluh	Negeri	4	128	
SMPT Aluh-Aluh	Aluh-Aluh	Negeri	1	32	
SMPN 2 Aluh-Aluh	Aluh-Aluh	Negeri	2	64	
SMPN 3 Aluh-Aluh	Aluh-Aluh	Negeri	1	32	
SMPN 4 Aluh-Aluh	Aluh-Aluh	Negeri	2	64	
SMPN 5 Aluh-Aluh	Aluh-Aluh	Negeri	1	32	
SMPN 6 Aluh-Aluh	Aluh-Aluh	Negeri	1	32	
SMPN 7 Aluh-Aluh	Aluh-Aluh	Negeri	1	32	
SMPN 8 Aluh-Aluh	Aluh-Aluh	Negeri	1	32	
SMPN 1 Aranio	Aranio	Negeri	1	32	
SMPN 2 Aranio	Aranio	Negeri	1	32	
SMPN 3 Aranio	Aranio	Negeri	1	32	
SMPN 4 Aranio	Aranio	Negeri	1	32	
SMPN 1 Astambul	Astambul	Negeri	4	128	
SMPT Astambul	Astambul	Negeri	5	160	
SMPN 2 Astambul	Astambul	Negeri	1	32	
SMPN 3 Astambul	Astambul	Negeri	2	64	
SMPN 4 Astambul	Astambul	Negeri	1	32	
SMPN 1 Beruntung Baru	Beruntung Baru	Negeri	3	96	
SMPN 1 Cintapuri Darussalam	Cintapuri Darussalam	Negeri	1	32	
SMPN 2 Cintapuri Darussalam	Cintapuri Darussalam	Negeri	3	96	
SMPN 3 Cintapuri Darussalam	Cintapuri Darussalam	Negeri	1	32	
SMPN 4 Cintapuri Darussalam	Cintapuri Darussalam	Negeri	1	32	
SMPN 1 Gambut	Gambut	Negeri	8	256	
SMPN 2 Gambut	Gambut	Negeri	1	32	
SMPN 3 Gambut	Gambut	Negeri	3	96	
SMPN 1 Karang Intan	Karang Intan	Negeri	1	32	
SMPT Karang Intan	Karang Intan	Negeri	1	32	
SMPN 2 Karang Intan	Karang Intan	Negeri	3	96	
SMPN 3 Karang Intan	Karang Intan	Negeri	2	64	
SMPN 4 Karang Intan	Karang Intan	Negeri	1	32	
SMPN 5 Karang Intan	Karang Intan	Negeri	2	64	
SMPN 6 Karang Intan	Karang Intan	Negeri	2	64	
SMPN 7 Karang Intan	Karang Intan	Negeri	2	64	
SMPN 1 Kertak Hanyar	Kertak Hanyar	Negeri	7	224	
SMPN 2 Kertak Hanyar	Kertak Hanyar	Negeri	6	192	
SMPN 1 Martapura	Martapura	Negeri	9	288	

SMPN 2 Martapura	Martapura	Negeri	6	192	
SMPN 3 Martapura	Martapura	Negeri	8	256	
SMPN 4 Martapura	Martapura	Negeri	3	96	
SMPN 5 Martapura	Martapura	Negeri	2	64	
SMPN 6 Martapura	Martapura	Negeri	4	128	
SMPN 1 Martapura Barat	Martapura Barat	Negeri	3	96	
SMPN 2 Martapura Barat	Martapura Barat	Negeri	1	40	Pengecualian
SMPN 1 Martapura Timur	Martapura Timur	Negeri	2	64	
SMPN 2 Martapura Timur	Martapura Timur	Negeri	2	64	
SMPT Martapura	Martapura Timur	Negeri	4	128	
SMPN 1 Mataraman	Mataraman	Negeri	3	96	
SMPN 2 Mataraman	Mataraman	Negeri	2	64	
SMPN 3 Mataraman	Mataraman	Negeri	3	96	
SMPN 4 Mataraman	Mataraman	Negeri	1	32	
SMPN 1 Paramasan	Paramasan	Negeri	1	40	Pengecualian
SMPN 1 Pengaron	Pengaron	Negeri	3	96	
SMPN 2 Pengaron	Pengaron	Negeri	1	32	
SMPN 3 Pengaron	Pengaron	Negeri	1	32	
SMPN 1 Sambung Makmur	Sambung Makmur	Negeri	2	64	
SMPN 2 Sambung Makmur	Sambung Makmur	Negeri	1	32	
SMPN 1 Simpang Empat	Simpang Empat	Negeri	4	128	
SMPT Simpang Empat	Simpang Empat	Negeri	2	64	
SMPN 2 Simpang Empat	Simpang Empat	Negeri	3	96	
SMPN 3 Simpang Empat	Simpang Empat	Negeri	1	32	
SMPN 4 Simpang Empat	Simpang Empat	Negeri	1	32	
SMPN 1 Sungai Pinang	Sungai Pinang	Negeri	3	96	
SMPT Sungai Pinang	Sungai Pinang	Negeri	2	64	
SMPN 2 Sungai Pinang	Sungai Pinang	Negeri	1	32	
SMPN 3 Sungai Pinang	Sungai Pinang	Negeri	1	32	
SMPN 1 Sungai Tabuk	Sungai Tabuk	Negeri	4	128	
SMPN 2 Sungai Tabuk	Sungai Tabuk	Negeri	4	128	
SMPN 3 Sungai Tabuk	Sungai Tabuk	Negeri	2	64	
SMPN 4 Sungai Tabuk	Sungai Tabuk	Negeri	4	128	
SMPN 1 Tatah Makmur	Tatah Makmur	Negeri	3	96	
SMPN 1 Telaga Bauntung	Telaga Bauntung	Negeri	1	32	
	Jumlah		177	5,680	
SMP Muhammadiyah Biih	Karang Intan	Swasta	1	32	
SMP Muhammadiyah Boarding School	Karang Intan	Swasta	2	64	
SMP Mitra Kasih	Martapura	Swasta	3	96	
SMP Darul Hijrah	Martapura	Swasta	6	192	
SMP Darul Hijrah puteri	Martapura	Swasta	10	320	
SMP Darussalam	Martapura	Swasta	2	64	
SMP Hidayatullah	Martapura	Swasta	1	32	
SMP Tahfizul Quran	Martapura	Swasta	2	64	

SMP Tahfiz Quran DH 3	Martapura	Swasta	2	64	
SMP IT Ushuludin	Martapura Timur	Swasta	2	64	
SMP Islam Arriyadh	Sambung Makmur	Swasta	2	64	
	Jumlah		33	1,056	
	JUMLAH KESELURUHAN		210	6,736	

2 sekolah yang memohon pengecualian jumlah rombel perkelas 40 siswa:

1. SMPN 2 Martapura Barat
2. SMPN 1 Paramasan

Catatan:

Jumlah Keseluruhan daya tampung SMP Negeri & Swasta
 Dengan rumus Ruang Kelas Awal x Jumlah Maksimal Siswa

SMP Negeri : $177 \times 32 = 5.680$

SMP Swasta : $33 \times 32 = 1.056$

Total daya tampung SMP = **6.736** siswa

Ditetapkan di : Martapura

Pada tanggal : 26 Maret 2026

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Banjar



H. Liana Penny, ST, MS
 Pembina TK. I

NIP. 19800712 200501 2 013